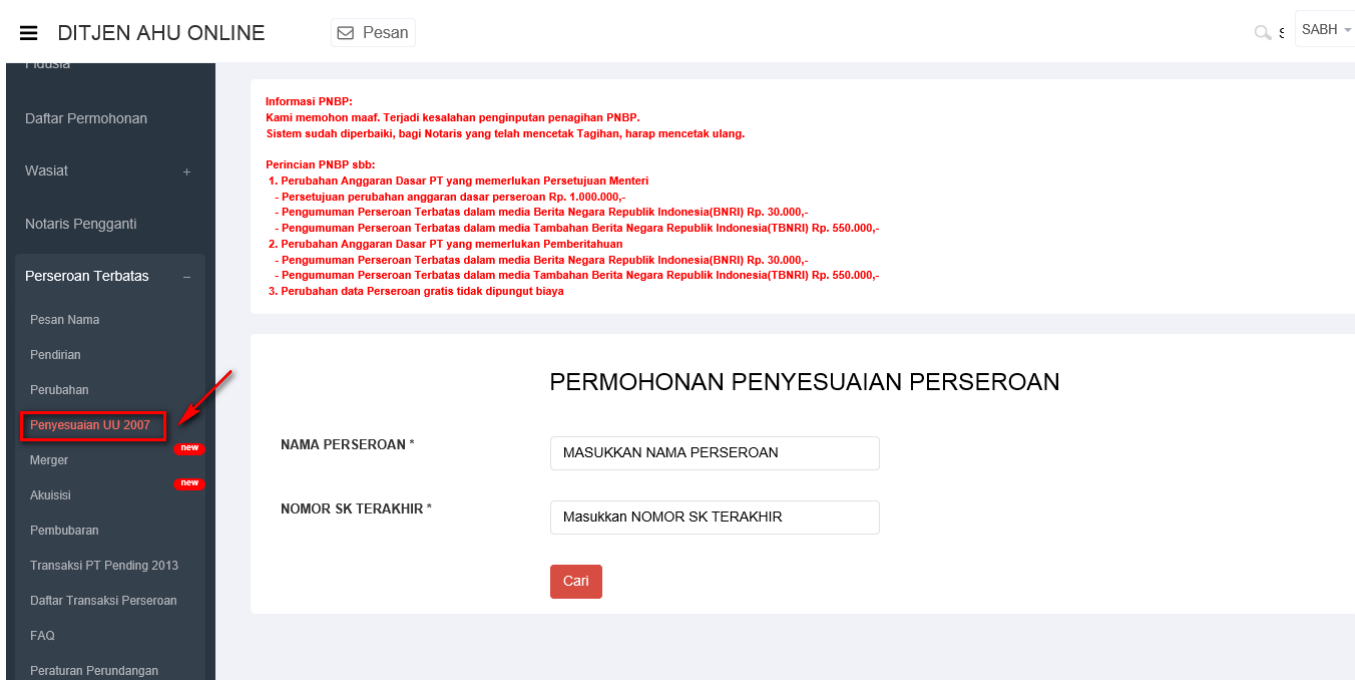


8. Penyesuaian UU 2007

Penyesuaian oleh Notaris

1. Masuk ke halaman Penyesuaian UU 2007 melalui menu di sebelah kiri



2. Masukkan Nama Perseroan dan Nomor SK Terakhir

☰ DITJEN AHU ONLINE ✉ Pesan 🔍 SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti
Login SABH

Informasi PHBP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PHBP. Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PHBP sbb:
1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
- Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PENYESUAIAN PERSEROAN

NAMA PERSEROAN 1

NOMOR SK TERAKHIR 2

3

1. Masukkan Nama Perseroan.
2. Masukkan Nomor SK Terakhir.
3. Klik tombol maka akan tampil halaman persyaratan penyesuaian.

Informasi PINBP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PINBP.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

- Perincian PINBP sbb:
- Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
 - Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
 - Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PENYESUAIAN PERSEROAN

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

NOMOR SK TERAKHIR:

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
------	---------	---------------------

Persyaratan Utama

- Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
- RUPS
- II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- V. NPWP

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

- Ceklist semua persyaratan utama.
- Ceklist jika telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Klik tombol maka akan keluar allert perhatian!!!

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?

- Klik tombol **Kembali** akan tampil ke permohonan perubahan awal.
- Klik tombol **Saya Yakin**

3. Masuk ke halaman jenis Permohonan Penyesuaian

The screenshot shows a web form titled "Permohonan Penyesuaian" for "PT SEMEN GUN". The form includes the following sections and elements:

- Ringkasan Perseroan:** Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS / UMUM; Status Perseroan : Tertutup.
- Jenis Perubahan:** A checkbox labeled "1" is checked for "Penyesuaian Undang-Undang PT Tahun 2007". Below it are links for "Persetujuan perubahan anggaran dasar", "Pemberitahuan perubahan anggaran dasar", and "Pemberitahuan perubahan data Perseroan".
- Akta Notaris Terakhir:** A field for "Nomor Akta:" is highlighted with a red box and labeled "2". A field for "Tanggal Akta:" is highlighted with a red box and labeled "3". A blue button labeled "Tambah Data" is highlighted with a red box and labeled "4".
- Tanggal:** A field for "RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat:" is highlighted with a red box and labeled "5".
- Declaration:** A yellow box contains a checkbox labeled "6" with the text: "Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas."
- Buttons:** At the bottom left, a red button labeled "KEMBALI" is highlighted with a red box and labeled "7". A blue button labeled "LANJUTKAN" is highlighted with a red box and labeled "8".

1. Otomatis terceklist Jenis perubahan Penyesuaian Undang-Undang PT Tahun 2007.
2. Masukkan Nomor Akta Terakhir.
3. Masukkan Tanggal AKta.
4. Klik tombol **Tambah Data** jika nomor akta lebih dari satu.
5. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
6. Ceklist jika informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Klik tombol **Kembali** jika ada data yang tidak sesuai
8. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar alert perhatian!!!



- Klik tombol **Kembali** akan tampil ke permohonan penyesuaian awal.
- Klik tombol **Saya Yakin**

4. Masuk ke halaman Permohonan Penyesuaian PT

Permohonan Penyesuaian
PT BERBENTUK CV

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- Nama
- Tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan
- Jangka waktu
- Peningkatan Modal dasar
- Pengurangan Modal dasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan
- Jenis Perseroan
- Direksi dan Komisaris
- Peralihan saham
- Ganti nama pemegang saham
- Alamat Lengkap Perseroan

KEMBALI **LANJUTKAN**

- Ceklist jenis perubahan yang diinginkan, seperti tampilan dibawah ini :

Permohonan Penyesuaian

PT SEMEN GUN

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

Nama

Persyaratan Perubahan Nama

Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

Jangka waktu

Peningkatan Modal dasar

Permohonan

Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti

- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
- 30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Pengurangan Modal dasar

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

Status Perseroan

Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

Izin Prinsip BKPM

Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontak Karyawan
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

Ganti nama pemegang saham

Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

1

KEMBALI

LANJUTKAN

2

1. Klik tombol **Kembali** jika ada data yang tidak sesuai
2. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



5. Masuk ke halaman Isian Penyesuaian Perseroan Terbatas

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan:

Nama Singkatan:

Jenis Perseroan:

NPWP Perseroan*:

Jangka Waktu Perseroan:

Status Perseroan:

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi: Kabupaten:

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan:

RT: RW:

Kecamatan: Kelurahan:

Kode Pos: Nomor Telepon:

Maksud dan Tujuan

MAKSUD:

TUJUAN:

MAKSUD:

TUJUAN:

AKTA NOTARIS

Nama Notaris:

Nomor Akta: Tanggal Akta:

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbaharui Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbaharui Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbaharui Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbaharui Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbaharui Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbaharui Hapus

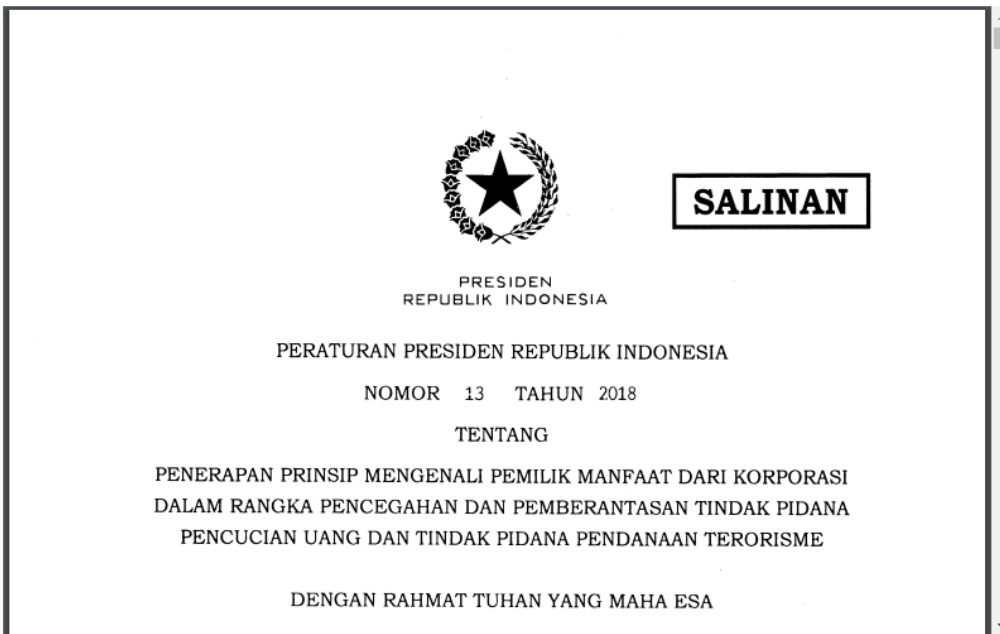
TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

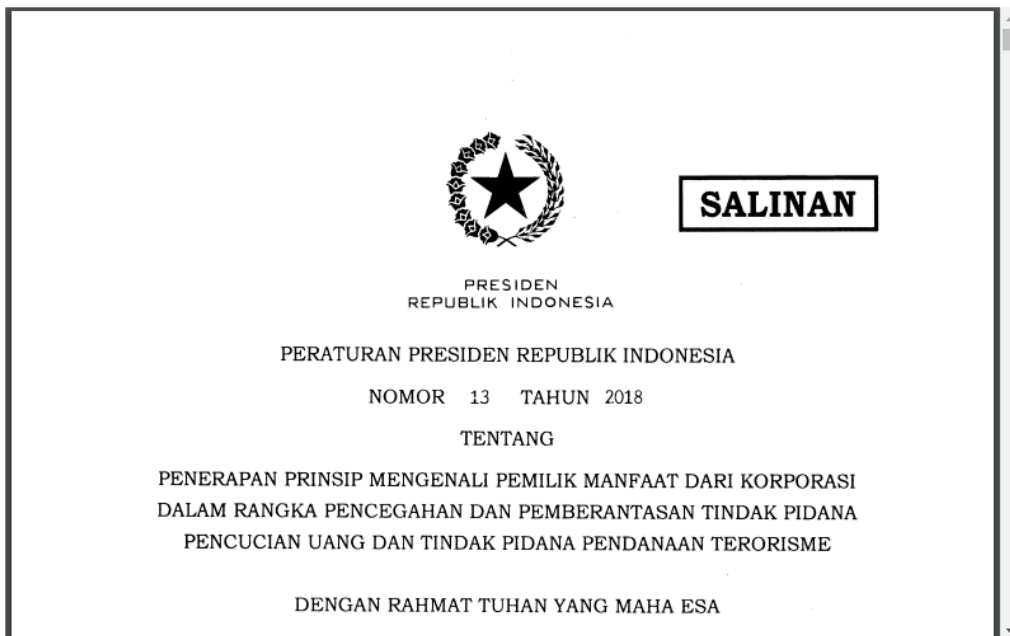
* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

- Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Klik tombol 

6. Masuk ke halaman Pra Tinjau Penyesuaian Data Perseroan

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan:

Jenis Perseroan:

NPWP Perseroan *:

Jangka Waktu Perseroan:

Status Perseroan:

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi: Kabupaten:

Maksud dan Tujuan *
 Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor

Maksud dan Tujuan
 Jasa Perorangan Lainnya

Maksud dan Tujuan
 Real Estat

AKTA NOTARIS

Nomor Akta: Tanggal Akta:

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	125.000	Rp 125.000.000.000

Total modal dasar Rp 125.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	65.000	Rp 65.000.000.000

Total modal ditempatkan Rp 65.000.000.000

MODAL DISETOR *

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	10.000	PRESIDEN DIREKTUR	Rp 10.000.000.000
<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	10.000	KOMISARIS INDEPENDEN	Rp 10.000.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

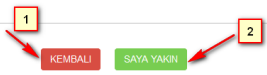
Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar
 - Tempat kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan, Jangka Waktu, Peningkatan modal dasar, Status Perseroan

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar
 - Jenis Perseroan

Pemberitahuan perubahan data Perseroan
 - Direksi dan Komisaris



1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**

6. Masuk ke halaman daftar transaksi perseroan

☰ DITJEN AHU ONLINE ✉ Pesan 🔍 SABH ▾

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbalas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti
Login SABH

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.
Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.
Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.
Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

No.	NOMOR TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	JENIS PERSEROAN	NAMA PERSEROAN	STATUS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	Download
1	4014051631260004	Perubahan	PMDN FASILITAS	PT. PERUSAHAAN BUKIT BARU	BELUM BAYAR	16 Mei 2014	- Tagihan - Permohonan
2	4014051636400011	Penggabungan	PMDN FASILITAS	PT. PERUSAHAAN BUKIT BARU	SUDAH BAYAR	16 Mei 2014	- SK Perubahan - SP Perubahan Anggaran Dasar - SP Perubahan Data Perseroan - SP Penggabungan Perseroan

- Klik dan download tagihan bukti perubahan perseroan



DITJEN AHU

BUKTI PERUBAHAN PERSEROAN

No. Transaksi	:	[REDACTED]
Nama NOTARIS	:	[REDACTED]
Nama PERSEROAN	:	[REDACTED]
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jenis Permohonan	:	Perubahan Perseroan
Biaya PNPB	:	RP 1.000.000
Biaya TBNRI	:	RP 550.000
Biaya BNRI	:	RP 30.000

- Klik dan download permohonan perubahan perseroan

BUKTI PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

Nama NOTARIS	:	[REDACTED]
Nama PERSEROAN	:	[REDACTED]
Propinsi Wilayah	:	JAWA BARAT
Kabupaten/Kota	:	KOTA BEKASI

8. Ketika status transaksi sudah bayar perubahan PT tersebut, maka akan muncul SK Perubahan

- SK Perubahan dan Lampirannya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00002.40.27.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 01 Mei 2014 tentang Perubahan Badan Hukum [REDACTED] tanggal 19 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum [REDACTED]

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.12 Tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-00002.40.27.2014 TANGGAL 19 Mei 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00002.40.27.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 125.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 65.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	PRESIDEN	-	10.000	Rp 10.000.000.000
[REDACTED]	DIREKTUR	-	10.000	Rp 10.000.000.000
[REDACTED]	KOMISARIS INDEPENDEN	-	10.000	Rp 10.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-00002.40.27.2014 TANGGAL 19 Mei 2014

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=penyesuaian_uu_2007

Last update: **2021/08/30 10:54**

